

Praktik Akuntansi dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi (Sebuah Studi Pada UMKM)

Oleh:
Devi Probosari
105020300111063

ABSTRAKSI

Studi ini meneliti implementasi akuntansi pada UMKM serta implikasinya terhadap kualitas informasi dan pengambilan keputusan studi kasus pada CV. X. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran mengenai praktik akuntansi yang diterapkan pada CV. X dan mengetahui alasan di balik implementasinya serta mengetahui implikasi atas penerapan praktik akuntansi tersebut terhadap kualitas informasi yang dihasilkan oleh CV. X.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah UMKM skala menengah di daerah Pasuruan yang bergerak di industri *concentrate block*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur dan studi web. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif untuk melakukan analisa data.

Hasil penelitian ini menyatakan praktik akuntansi pada CV. X belum sepenuhnya mengacu pada SAK ETAP. Meskipun telah mampu menyusun sejumlah laporan keuangan sesuai amanat ETAP, CV. X belum mampu mengimplementasikan akuntansi yang sesuai standar dengan baik. Hal ini didasari berbagai faktor diantaranya lingkungan, minimnya kompetensi sumber daya manusia perusahaan, kelemahan dalam sistem pengendalian perusahaan serta kurangnya peraturan dan pengaturan dari pemerintah. Dampaknya perusahaan gagal memenuhi syarat kualitatif dari kualitas informasi. Namun hal tersebut ternyata tidak berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Buruknya praktik akuntansi pada CV. X rupanya tidak berpengaruh secara signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Implementasi akuntansi, UMKM, Kualitas Informasi akuntansi

Pendahuluan

Ditinjau dari jumlah pelaku usaha dan penyerapan tenaga kerja, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dipandang sebagai sokoguru utama perekonomian bangsa. UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Karakteristik UMKM yang kuat, dinamis dan efisien dinilai mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa UMKM memiliki peran yang cukup penting di Indonesia.

Berdasar kajian Bank Indonesia pada tahun 2009, peran penting UMKM dapat ditinjau dalam tiga indikator. *Pertama*, berdasar jumlah unit industrinya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 mencatat jumlah UMKM mencapai 56,54 juta unit atau setara dengan 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. *Kedua*, berdasar kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2012, UMKM tercatat mampu menyediakan lapangan kerja bagi 107 juta lebih tenaga kerja atau menyerap sekitar 97% angkatan kerja. *Ketiga*, berdasar kontribusinya terhadap pendapatan nasional. UMKM mampu menyumbang 59,8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2012. UMKM juga dikenal sebagai salah satu jenis industri yang paling kreatif. Seringkali terjadi, bahwa produk-produk yang dihasilkan UMKM merupakan satu ide original yang menyajikan terobosan-terobosan baru dalam penciptaannya. Sejalan dengan hal tersebut, Wulan dan Nindita (2009) menambahkan peran UMKM sebagai perintis pasar baru dan inovasi.

Melalui penjelasan tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai dominasi UMKM dalam perekonomian Indonesia. UMKM juga memiliki peran strategis sebagai jaring pengaman rakyat dalam menghadapi krisis dan turbulensi ekonomi. Hal ini telah teruji dalam krisis ekonomi 1997. UMKM terbukti mampu bertahan bahkan mendinamiskan perekonomian Indonesia (Musnandar 2011). Khusus dalam kerangka ASEAN, UMKM di negara-negara ASEAN akan segera menghadapi era baru liberalisasi, termasuk liberalisasi pasar keuangan, yang dicanangkan sebagai salah satu tujuan dalam *ASEAN Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Dengan MEA 2015 maka diharapkan ASEAN akan memiliki 4 karakteristik utama yaitu sebagai: 1. Pasar tunggal dan kesatuan basis produksi; 2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing; 3. Pertumbuhan ekonomi yang merata; dan 4. Meningkatnya kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global (Bank Indonesia,2009).

Pengembangan UMKM dalam kerangka AEC 2015 dilaksanakan dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata, dimana pelaksanaannya mengacu pada *ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD) 2004 – 2014*. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM, sebagaimana dicantumkan dalam APBSD adalah perlunya peningkatan akses permodalan oleh UMKM. Salah satu wujud upaya pemerintah Indonesia, selaku negara anggota ASEAN untuk meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan adalah dengan menyelenggarakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kendati program KUR telah berjalan dan pada tahun 2012, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) diprediksikan akan naik sebesar 18%, atau menjadi Rp151 triliun dari 2011 yang sebesar Rp128,2 triliun, tercatat bahwa realisasi kredit

UMKM pada tahun 2011 pada perbankan di Indonesia hanya mencapai 66,8% dari RBB tahun 2011 (Sindonews.com, 2012). Hal ini mengindikasikan rendahnya akses UMKM terhadap permodalan.

Secara garis besar masalah keterbatasan akses permodalan UMKM lebih diakibatkan karena terbatasnya informasi yang dapat digunakan oleh manajemen, calon investor ataupun kreditor dalam menilai dan memantau perkembangan UMKM tersebut. Disinilah pentingnya praktik akuntansi bagi UMKM, karena dengan diselenggarakannya praktik akuntansi secara tepat maka UMKM dapat menyediakan informasi yang lebih lengkap dan terstruktur terkait usaha dan posisi keuangannya.

Pada kenyataannya, banyak UMKM yang belum menyelenggarakan praktik akuntansi apalagi menggunakan informasi akuntansi secara maksimal dalam pengelolaan usahanya (Pinasti, 2001; Rudiantoro & Siregar, 2011; dan Suhairi, dkk, 2004). Masih banyak UMKM yang menggunakan pencatatan secara tradisional tanpa memperhatikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sejumlah UMKM menyatakan penyusunan laporan keuangan yang berdasar SAK cenderung memakan biaya dan rumit. Selain itu, nilai manfaat yang dihasilkan dinilai tidak sebanding. Padahal, implementasi praktik akuntansi yang baik akan menambah nilai informasi serta memegang peran penting dalam proses pengambilan keputusan (Suhairi, 2006). Melalui penyusunan laporan keuangan, pemilik akan memperoleh gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan yang tersusun dan sistematis, sehingga pengambilan keputusan yang rasional akan lebih mudah dicapai. Selain itu, implementasi praktik akuntansi akan meningkatkan akses UMKM terhadap sumber daya keuangan, karena laporan keuangan merupakan bagian mutlak yang harus dimiliki oleh UMKM jika mereka hendak melakukan pengajuan modal terhadap pihak kreditor, dalam hal ini lembaga keuangan formal.

Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2011 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) selaku organisasi yang berkewenangan terkait praktik akuntansi di Indonesia, menerbitkan Standar Akuntansi dan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang merupakan adopsi dari *International Financial Reporting System (IFRS) for Small and Medium Enterprise*. SAK ETAP ini diharapkan mampu berfungsi sebagai acuan praktik akuntansi bagi UMKM mengingat isinya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha yang ada. Pada akhirnya, aplikasi laporan keuangan sesuai SAK ini diharapkan menjadi suatu langkah menuju peningkatan akses permodalan bagi UMKM.

Namun pada kenyataannya, kendati telah dimodifikasi sedemikian rupa dan mengalami sejumlah penyederhanaan, jumlah UMKM yang mengimplementasikan SAK ETAP masih sangat minim. Hal ini menarik menurut peneliti, karena keberadaan SAK ETAP seharusnya mampu memberikan jalan keluar bagi permasalahan UMKM terkait pengelolaan keuangan dan akses permodalan. Apalagi SAK ETAP telah dirumuskan secara sederhana untuk memudahkan praktik di lapangan. Berdasar hal tersebut, seharusnya pelaku UMKM memiliki preferensi untuk menerapkan praktik akuntansi berdasar SAK ETAP dibanding pencatatan secara tradisional. Namun yang terjadi justru sebaliknya, banyak UMKM yang memilih tetap bertahan dengan praktik akuntansinya masing-masing. Uniknya,

sejumlah UMKM tersebut mampu tetap eksis dan mempertahankan usahanya sekalipun tidak menerapkan praktik akuntansi ala SAK ETAP.

Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini mengangkat CV. X yang merupakan perusahaan skala menengah di daerah Pasrepan, Pasuruan- Jawa Timur sebagai subjek penelitian. Secara garis besar CV. X telah mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan amanat SAK ETAP, namun dalam proses penyusunannya ternyata perusahaan belum mampu memisahkan unsur tradisional dan kebiasaan yang telah lebih dulu melekat. selain itu, kendati berhasil melakukan penyusunan laporan keuangan, perusahaan dinilai belum mampu memanfaatkan laporan tersebut secara maksimal, sehingga keberadaan laporan keuangan tak ubahnya kertas berisi sejumlah angka yang sia-sia. Kondisi ini cukup menarik dan sebenarnya sering ditemukan dalam aktivitas operasional UMKM.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Melalui penelitian ini diharapkan muncul satu gambaran besar bagaimana sebenarnya UMKM menjalankan praktik akuntansinya, sehingga dapat dirumuskan satu standar maupun peraturan yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan UMKM itu sendiri. Sehingga eksplorasi secara komprehensif terhadap praktik akuntansi pada UMKM di Indonesia dapat dilakukan. Begitu pula implikasinya terhadap proses pengambilan keputusan dan kualitas informasi serta tingkat visibilitas SAK ETAP dalam praktik akuntansi UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ruang penelitian yang lebih luas dan terarah dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas UMKM di Indonesia. Berdasar hal tersebut, penelitian ini berusaha melakukan eksplorasi secara lebih mendalam atas penelitian terdahulu, dengan mengambil tema implementasi akuntansi pada UMKM.

Praktik Akuntansi di Indonesia

Umumnya UMKM di Indonesia masih jarang yang menyelenggarakan praktik akuntansi dalam pengelolaan usahanya (Pinasti, 2001), sehingga kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan UMKM pun masih rendah (Rudiantoro & Siregar, 2011). Praktik akuntansi pada UMKM di Indonesia memiliki banyak kelemahan (Suhairi, dkk, 2004). Secara garis besar kelemahan tersebut antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan *overload* standar akuntansi yang dijadikan pedoman penyusunan pelaporan keuangan selama ini (William et.al.1989;Knutson dan Henry,1985; Nair dan Rittenberg.1983;Wishon,1985;Murray et.al,1983). Berikut merupakan gambaran mengenai kondisi praktik akuntansi di Indonesia menurut Furqon dan Karim (2011):

a. Persepsi terhadap urgensi keberadaan informasi akuntansi bagi UMKM

Tidak adanya penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi dalam kebanyakan pengelolaan UMKM ditentukan oleh persepsi pengusaha mereka atas informasi akuntansi. Bagi sebagian besar UMKM, tidak pentingnya pemanfaatan informasi akuntansi karena mereka merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi (Hariyanto, 1999) dan memandang akuntansi merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dijangkau (Idrus, 2000). Selain itu tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan para pelaku UMKM belum pernah merasakan manfaat dari informasi akuntansi.

b. Pengetahuan Akuntansi Pemilik/ Staf UMKM

Menurut berbagai penelitian dalam Marbun (1997), salah satu kelemahan UMKM di Indonesia ialah pada umumnya mereka tidak menguasai dan tidak mempraktekkan sistem keuangan yang memadai. Pada umumnya UMKM tidak atau belum memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola catatan akuntansi secara ketat dan berdisiplin dengan pembukuan yang teratur, baik dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya, sehingga banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha.

c. Pertimbangan Biaya-Manfaat (*cost-effectiveness*) bagi UMKM

Salah satu alasan tidak adanya catatan akuntansi yang memadai pada UMKM adalah kebutuhan akan pengadaan catatan akuntansi yang dianggap hanya membuang-buang waktu dan biaya (Marbun, 1997). Para pelaku UMKM merasa terlalu direpotkan dengan penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut dan menganggap bahwa yang penting adalah mereka mendapatkan laba tanpa direpoti dengan penyelenggaraan akuntansi (Pinasti, 2001).

d. Ukuran UMKM

Pinasti (2001) menemukan bahwa ukuran usaha merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan lingkungan pengusaha UMKM. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya.

Akuntansi dan Laporan Keuangan

Akuntansi dapat didefinisikan dari berbagai aspek. Salah satu definisi yang umum dipergunakan untuk menjelaskan terminologi “akuntansi” adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA:1930), bahwa “*Akuntansi adalah suatu seni tentang pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, dengan cara yang informatif dan bentuk uang, transaksi atau kejadian keuangan perusahaan, dan interpretasi atas hasilnya*“. Akuntansi berfungsi memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas aktivitas ekonomi suatu entitas. Informasi paling umum yang dihasilkan dalam proses akuntansi berwujud laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Kieso, Weygdant & Warfield, 2007). Sementara menurut Harahap (2000: 49) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Di samping itu, laporan keuangan juga dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen

(*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2009).

Tujuan laporan keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka informasi akuntansi atau laporan keuangan harus memenuhi syarat kualitatif seperti dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Akuntansi dan Perilaku

Akuntansi merupakan alat, dimana pemanfaatannya akan sangat bergantung pada individu penggunaannya. Seperti yang diketahui bahwa individu bersifat unik. Masing-masing individu memiliki persepsi dan pandangan yang beragam terkait satu permasalahan. Demikian pula dalam praktik akuntansi, masing-masing individu yang terlibat dalam praktik tersebut memiliki preferensi dan persepsi yang beragam. Pandangan tersebut terbentuk dari berbagai aspek, misalnya pendidikan, kultur budaya bahkan interaksi dengan masyarakat sekitar. Untuk itu, penelitian ini mengambil beberapa teori terkait pembentukan pola pikir dan preferensi untuk memperoleh landasan yang cukup terkait persepsi manajemen terhadap praktik akuntansi.

Teori Komunikasi Aksi

Dalam buku *The Theory of Communicative Action*, Habermas (1983) mengkaji interaksi sosial dan menyebutnya sebagai *lifeworld*. *Lifeworld* terdiri dari interaksi yang memenuhi kebutuhan alami atau kebutuhan dasar (*social integration*) dan interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem (*system integration*). Sawarjuwono (1995:13) dalam Meutia (2010:38) kemudian mendefinisikannya sebagai:

“interactions which are based on immaculate interest and needs inherent in human beings and aimed at reaching towards mutual understanding”.

Social integration dan *system integration* kemudian memacu struktur *lifeworld* yang bersifat reproduktif atau pengulangan. Hal ini diutarakan Habermas (1983) sebagai berikut: *Lifeworld* terdiri dari dua struktur yaitu *symbolic* dan *material reproduction*. *Symbolic* dapat berupa *knowledge* sedangkan *material reproduction* merupakan tindakan bertujuan yang dapat berwujud keputusan, aturan dan sebagainya. Keduanya merupakan hasil dari *social integration* dan *system integration*. *Social integration* dapat dipahami sebagai pengetahuan dan *system integration* merupakan praktik. Proses reproduksi ini berlangsung terus dan karenanya *lifeworld* selalu berubah.

Sistem dalam hal ini merupakan tindakan yang terkoordinasi melalui keberadaan institusi, struktur normatif terutama melalui *steering media* yaitu *money* dan *power*. Setiap keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan untung – rugi

serta perhitungan ekonomi lainnya, sementara *power* mempengaruhi interaksi melalui tekanan institusi ataupun administrasi dan birokrasi. Namun demikian, menurut Habermas hanya *material reproduction* yang dapat dipengaruhi oleh *steering media*. Meski bertolak belakang, hal tersebut bisa dibuktikan kaitannya dengan pelaporan keuangan sebagai suatu *knowledge*. Pelaporan keuangan dapat dilihat sebagai suatu interaksi sosial. Mekanisme ini mengikuti proses *social integration* yaitu *what should be*. Akan tetapi dalam kenyataannya, kebijakan pelaporan keuangan akan mengikuti kepentingan (*interest*) berbagai pihak. Pihak – pihak dengan berbagai kepentingan ini kemudian membawa kepentingannya masing – masing. Akibatnya, *money* dan *power* berperan besar dalam menentukan pihak yang kepentingannya diprioritaskan perusahaan. Artinya, proses tersebut sudah tidak murni lagi karena adanya suatu kepentingan atau dengan kata lain proses tersebut mengikuti *system integration*. Hal ini sesuai dengan pendapat Habermas bahwa di dalam mekanisme *system integration*, terdapat pengaruh kuat dari *steering media*, yaitu *money* dan *power mechanism*.

Teori Stakeholder

Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta dkk.(2008 dalam Rizki, 2010) yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Gray, Kouhy, dan Adams (1994, p. 53) dalam Chariri dan Ghazali (2007:409) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Hal inilah yang mendasari perbedaan cara perusahaan dalam bersikap terhadap satu *stakeholder* dan *stakeholder* lainnya.

Ullman (1985) mengungkapkan, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*”. Tidak berhenti di situ, perusahaan juga kemudian lebih memprioritaskan satu *stakeholder* tertentu dibanding yang lain. Ditegaskan lebih lanjut oleh Ullman (1985) bahwa organisasi akan memilih *stakeholder* yang dianggap penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

Atas dasar argumen di atas, *stakeholder theory* umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk *manage stakeholder*-nya (Gray et al 1997. dalam Chariri 2007:410). Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk *manage stakeholder*-nya tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman, 1985) baik strategi aktif maupun pasif. Salah satunya melalui penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan terbukti mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap manajemen. Kepercayaan ini yang seterusnya menjadi modal awal bagi manajemen untuk melakukan akses permodalan dan sebagainya.

Teori di atas menegaskan bahwa pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengelola kepercayaan para pemangku kepentingan, dimana keberadaan *stakeholder* akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap

urgensi praktik akuntansi perusahaan. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui persepsi manajemen terhadap praktik akuntansi perusahaan. Kedua teori ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menganalisa lebih lanjut motivasi di balik pemilihan implementasi akuntansi oleh manajemen CV. X.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Moleong (2008:6) menyatakan studi kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian untuk memahami fenomena yang dialami langsung oleh subjek penelitian, misalnya berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan maupun pemikiran. Senada dengan hal tersebut, Creswell (2010) menyatakan metode kualitatif sebagai metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu maupun kelompok yang dianggap sebagai masalah sosial.

Secara lebih spesifik, pendekatan yang diangkat dalam penelitian ini adalah metode Studi kasus. Menurut Nasution (2006:26) studi kasus merupakan bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial dimana manusia termasuk di dalamnya. Sementara Yin (2003:18) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas-batas antara fenomena sering tidak tampak tegas dan membutuhkan multisumber. Pada penelitian studi kasus, observasi dan penelitian dilakukan dengan berfokus pada satu subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada CV. X yang beralamat di Desa Rejosalam, Pasrepan, Pasuruan.

Masalah utama yang dibahas pada penelitian ini adalah implementasi praktik akuntansi pada CV. X serta implikasinya terhadap kualitas informasi yang dihasilkan perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Fokus berikutnya terletak pada implikasi pelaksanaan praktik akuntansi tersebut pada kualitas informasi yang dihasilkan dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga mengambil fokus pada motivasi di balik implementasi praktik akuntansi tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan dalam penyelenggaraan laporan keuangannya. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka atau data yang diangkakan. Data kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan CV. X pada bulan Mei 2013 yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan daftar aktiva tetap.

Pembahasan

Praktik Akuntansi CV. X dan Alasan Implementasinya

Akuntansi merupakan suatu proses sistematis yang unik. Dimana praktiknya dapat dipengaruhi berbagai hal, seperti faktor lingkungan, budaya bahkan kondisi sosial dan politik. Untuk itu, masing-masing entitas memiliki akuntansinya tersendiri meskipun mengacu pada pedoman yang sama. Tak terkecuali UMKM. Akuntansi yang diterapkan pada UMKM umumnya relatif lebih sederhana dibanding perusahaan besar dan *go public*, namun demikian hal tersebut tidak mengurangi keunikan dari

praktik akuntansi tersebut. Berikut merupakan pemaparan implementasi akuntansi pada CV. X:

Praktik akuntansi setengah hati ala CV. X

Setengah hati, demikian kata yang mungkin tepat untuk menggambarkan implementasi praktik akuntansi pada CV. X. Sekalipun perusahaan mengaku telah mengacu pada SAK ETAP dalam melaksanakan praktik akuntansinya, implementasi akuntansi pada CV. X masih belum secara sempurna menggambarkan semangat ETAP di dalamnya. Ditinjau dari produk akuntansi yang dihasilkan, CV. X memang telah mampu menyusun neraca, laporan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas pemilik. Kendati demikian dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut, perusahaan sering kali belum mampu menghilangkan cara-cara tradisional dan kebiasaan serta pandangan individu yang telah melekat lebih dulu.

Selain itu, perusahaan juga belum mampu memanfaatkan sejumlah laporan keuangan yang dihasilkan tersebut secara maksimal. Laporan-laporan tersebut hanya digunakan untuk memenuhi syarat administratif pengajuan pinjaman modal atau sebagai dasar pembayaran pajak. Padahal salah satu peran dasar akuntansi dalam perusahaan adalah sebagai instrument pengambilan keputusan. Seharusnya laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat menjadi landasan untuk mengambil keputusan yang terstruktur dan sistematis (Scott,2009). Namun yang terjadi pada CV. X berbeda. Perusahaan seolah-olah menutup mata akan keberadaan laporan keuangan yang telah dihasilkan. Bagi manajemen ada atau tidak adanya laporan keuangan tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan serta pengelolaan perusahaan.

Kondisi ini merebakan iklim kurang kondusif dalam ranah akuntansi CV. X. Peran akuntansi yang dipandang sebelah mata, menjadikan praktiknya kian terabaikan. Bagian akuntansi CV. X seringkali merasa kurang termotivasi untuk menyusun laporan keuangan perusahaan, menurut mereka perusahaan akan tetap mampu berjalan sekalipun tanpa laporan keuangan dan produk akuntansi lainnya. Akibatnya bagian akuntansi sering kali terlambat menghasilkan laporan keuangan perusahaan, metode penyusunannya pun sering kali dibuat ala kadarnya. Muaranya laporan keuangan yang dihasilkan oleh CV. X menjadi kurang representatif. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan seolah tersusun secara percuma. Praktik akuntansi pada CV. X telah gagal untuk melahirkan sebuah produk akuntansi yang mampu menggambarkan kondisi riil perusahaan. Laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak mampu menjadi landasan yang kokh bagi proses pengambilan keputusan.

Anggapan mengenai praktik akuntansi setengah hati pada CV. X kian diperkuat dengan munculnya berbagai kondisi unik dalam lingkup pencatatan dan pelaporan keuangan pada CV. X.

a. Di balik Bilik Pemilik

CV. X merupakan perusahaan perseorangan, dimana pemilik merupakan pemodal utama. Pada CV. X pemilik hanya bertindak sebagai pemegang saham dan pemangku kepentingan pasif. Artinya pemilik tidak melakukan campur tangan apapun terhadap aktivitas operasional perusahaan. Selama ini segala tanggung jawab dan otoritas sebagai pemuncak dalam manajemen perusahaan dipegang oleh

Direktur Utama. Hal ini menjadikan frekuensi keberadaan sang pemilik pada perusahaan sangat rendah. Bahkan sejumlah karyawan menyatakan belum pernah bertatap muka langsung dengan sang pemilik. Keberadaan sang pemilik nyaris tidak pernah terlihat semenjak perusahaan didirikan. Kendati demikian hal tersebut tak menyurutkan peran pemilik dalam perusahaan ini. Sekalipun tidak terkait langsung dalam aktivitas operasional perusahaan. Pemilik ternyata memiliki kuasa untuk mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Pemilik dapat sewaktu-waktu menarik dana dari perusahaan dalam bentuk “pinjaman pemilik” atau *prive*. Fakta mengejutkan kembali muncul ketika ditemukan bahwa sejumlah dana yang selama ini diminta oleh sang pemilik selalu di transfer ke satu rekening yang sama, yang tidak lain tidak bukan merupakan rekening pribadi sang direktur utama.

Tidak berhenti disitu, pemilik rupanya memiliki otoritas untuk meminta sejumlah barang hasil produksi untuk kepentingan pribadi. Terhitung beberapa kali selama 2013, pemilik mengambil sejumlah paving dan semen cor untuk digunakan pada fasilitas pribadinya. Kondisi ini seringkali diakui sebagai barang cacat produksi dan retur, bahkan tidak jarang kondisi ini tidak dicantumkan dalam laporan keuangan dan dianggap tidak pernah terjadi. Kondisi unik ini jelas sangat bertentangan dengan asumsi entitas dalam penyusunan laporan keuangan berdasar ETAP. Dimana dalam asumsi tersebut dinyatakan bahwa pemilik dan perusahaan merupakan entitas terpisah, dimana setiap aktivitas pemilik yang berkaitan dengan operasional perusahaan harus dicatat. Kendati demikian hal ini nyata terjadi.

Pemilik seolah merupakan satu individu yang kebal akuntansi dalam entitas ini. Dimana apapun aktivitas yang dilakukan terkait dengan operasional perusahaan dapat dengan mudah dihapuskan atau dianggap tidak ada. kondisi ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip akuntansi yang menuntut realibilitas dan kehandalan.

b. Kasir, Sang Kusir

Kasir merupakan bagian paling vital dari perusahaan ini. Kasir seolah menjadi jantung dari aktivitas operasional pada CV. X. Secara struktural, posisi kasir berada di bawah divisi keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada manajer keuangan. Namun dalam praktiknya, kasirlah yang justru memegang peran sentral terkait keuangan perusahaan.

Kondisi unik pertama ditemukan ketika mengamati luasnya wewenang kasir serta rendahnya pengawasan terhadap posisi tersebut. Kasir bertanggung jawab terhadap kas kecil perusahaan, melakukan segala jenis pembayaran yang jatuh tempo, menerima segala pembayaran dari klien, membuat rekapitulasi bukti keluar masuknya arus kas serta membuat catatan atas transaksi perusahaan. Kondisi menarik berikutnya ditemukan saat dilakukan penelaahan terhadap hasil catatan kasir. Rupanya bagian kasir dan para admin, sering kali mengabaikan urutan dan kronologis dalam pencatatan dengan berbagai alasan. Kondisi *nyeleneh* lain ditemukan berdasar pengakuan para admin, berdasar pengakuan para admin perusahaan kasir sering kali menerima “order” kesepakatan harga dari divisi produksi. Kasir sering kali diminta untuk sedikit merubah catatan atas harga bahan baku produksi.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam pelaporan keuangan, dimana laporan keuangan pada hakikatnya dibuat untuk memperkecil asimetri informasi antara manajemen dengan para pemangku kepentingan. Laporan

keuangan yang dihasilkan CV. X gagal menunjukkan kondisi riil keuangan perusahaan sehingga keberadaanya terkesan percuma.

Tahapan Praktik akuntansi ala CV. X

Praktik akuntansi pada CV. X secara garis besar dibagi atas 2 tahapan, yakni tahap pencatatan dan tahap penyusunan laporan keuangan. Tahap pencatatan merupakan tanggung jawab kasir bersama para admin, sementara pelaporan keuangan sepenuhnya menjadi tugas dari akuntan. Kendati terdapat pemisahan tugas yang jelas dalam tiap tahapan praktik akuntansi ala CV. X, namun produk akuntansi yang dihasilkan perusahaan akan sangat bergantung pada kinerja kasir. Keabsahan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan sangat bergantung pada kehandalan catatan yang dihasilkan oleh kasir. Akuntan perusahaan tidak akan mampu menghasilkan laporan yang baik, jika sumber informasi yang diterimanya tidak handal. Sehingga secara tersirat dapat dikatakan bahwa motor penggerak praktik akuntansi CV. X sebenarnya berada di tangan sang kasir. Sang kasir memiliki peran yang cukup besar terhadap kualitas informasi yang dihasilkan perusahaan termasuk dari sisi ketepatan waktu. Semakin cepat kasir mampu menyelesaikan catatannya maka semakin besar pula kemungkinan akuntan untuk menghasilkan laporan keuangan tepat waktu.

Produk akuntansi CV. X

Seperti telah dibahas sebelumnya, praktik akuntansi CV. X telah mampu menghasilkan sejumlah produk berupa catatan atas transaksi maupun laporan keuangan. Sekalipun belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, namun hal ini patut menjadi apresiasi, berikut merupakan sejumlah produk akuntansi yang telah dihasilkan oleh CV. X pada tiap-tiap tahapan:

1. Tahap Pencatatan

Terkait produk pencatatan yang dihasilkan, selama satu periode akuntansi, kasir dan para admin diharuskan untuk menghasilkan 6 jenis catatan, yakni:

1. Hutang dagang
2. Kas
3. Laporan kasir
4. Laporan penjualan, piutang dan pengiriman
5. Piutang persero, karyawan dan lain-lain
6. Utang penjualan dan lain-lain

2. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, CV. X telah berhasil menyusun sejumlah daftar akun untuk meringkas transaksi yang terjadi selama satu periode akuntansi. Pada tahap ini perusahaan sudah mampu menghasilkan sejumlah laporan sesuai dengan amanat SAK ETAP. CV. X telah mampu menyusun neraca, laporan laba rugi hingga laporan perubahan ekuitas. Kendati kesesuaian isinya belum tentu tepat, namun format penyusunannya telah sesuai dengan tata cara penyusunan laporan keuangan pada umumnya. Laporan keuangan perusahaan terlampir pada bagian akhir penelitian.

Alasan di balik Implementasi Praktik Akuntansi ala CV. X

Selalu terdapat motivasi atau alasan di balik satu perilaku. Berdasar teori legitimasi dan komunikasi aksi, dalam pelaporan keuangan motivasi utama yang mempengaruhi penyelenggaraannya adalah unsure *money and power*. Dimana hal ini mengindikasikan kepentingan *stakeholder*-lah yang menjadi penggerak utama dalam penyusunan laporan keuangan. Dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaporan keuangan terbentuk atas dasar tekanan atau legitimasi dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kondisi keuangan perusahaan atau lebih umum disebut pemangku kepentingan. Unsur tekanan inilah yang tidak ditemukan pada UMKM. Para pemangku kepentingan pada UMKM cenderung bersikap lebih fleksibel terhadap manajemen, selain itu satu-satunya investor internal dalam hal ini pemilik, tidak akan serta merta merombak manajemen sekalipun ditemukan kerugian dalam operasional perusahaan. Hal ini menyebabkan pelaporan keuangan tidak masuk dalam daftar prioritas dalam aktivitas perusahaan.

Pelaporan keuangan pada UMKM cenderung bersifat situasional, artinya laporan keuangan akan disusun dan disesuaikan dengan SAK ETAP manakala perusahaan berkepentingan untuk melakukan tersebut. Misalnya, ketika perusahaan berencana mengajukan pinjaman pada lembaga formal atau saat perusahaan diwajibkan melakukan pembayaran fiscal. Sehingga manajemen merasa tidak terlalu penting untuk senantiasa berpedoman pada SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain itu terdapat beberapa alasan lain yang mendukung implementasi praktik akuntansi ala UMKM pada CV. X. Berikut merupakan pembahasan mengenai sejumlah faktor lain yang mempengaruhi implementasi praktik akuntansi pada CV. X:

1. Lingkungan

CV. X berdiri di atas wilayah yang kental unsur budayanya. Penduduk sekitar merupakan masyarakat adat tengger, dimana masyarakat tersebut mayoritas masih sangat menghormati upacara adat, menjunjung tinggi tata karma serta masih sistem pengkastaan. Hal tersebut rupanya turut mempengaruhi praktik akuntansi CV. X.

Sebagai contoh, perusahaan harus menyisihkan sejumlah dana sebagai bagian kepedulian sosial yang secara rutin disalurkan melalui pemuka adat setempat. Dalam hubungan antar karyawan dalam CV. X, terasa betul ada sekat-sekat yang memisahkan antara atasan dengan bawahan. Benar-benar jauh dari suasana demokratis dan bebas. Demikian tata karma, kasta dan adat mampu membungkam akuntansi dan persepsi. Sedemikian kuat budaya dalam lingkungan mengakar, menjadikan nalar tak mampu lagi ditakar. Kekakuan pada CV. X bukan semata karena intelektualitas yang kurang mumpuni, bukan pula sekedar legitimasi yang tak tertandingi, namun ada budaya yang terlanjur menjelma. Demikianlah manifestasi lokalitas dalam satu entitas.

2. Cangkem Dadi Pakem

Profesionalisme dalam satu entitas seringkali ditakar melalui keberadaan seperangkat instrument. Legalitas merupakan prioritas, segala sesuatu harus tertulis jelas dan tegas. Hal ini yang masih belum ditemukan pada CV. X. Perusahaan masih terlalu permisif terhadap penggunaan bukti serta perjanjian. Seringkali transaksi yang

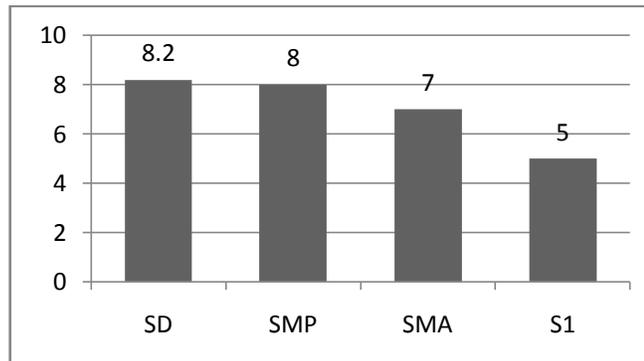
terjadi hanya sebatas kesepakatan via pesan singkat atau telpon. Sehingga tidak ada bukti atas transaksi tersebut. Hal ini menjadikan praktik akuntansi pada CV. X sering kurang representatif, karena baik kasir maupun akuntan tidak mampu membuktikan keterjadian atas sebuah transaksi. Selanjutnya, pada CV. X tidak memiliki peraturan secara jelas baik mengenai kebijakan akuntansi perusahaan maupun sistem pengendalian perusahaan.

3. Simalakama Sumber Daya Manusia *Oplosan*

Bukan rahasia jika CV. X merupakan entitas “kerabat dan saudara”. Semua karyawan dan staff yang bekerja pada CV. X rata-rata masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain. Umumnya para karyawan mendapat rekomendasi dari saudara atau kerabatnya yang telah lebih dulu bekerja pada CV. X. Menurutny, pada awal berdirinya CV. X, perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia, sehingga siapapun yang berkeinginan untuk ikut membantu dan berkontribusi pada perusahaan langsung dipersilahkan. Lambat laun, hubungan kerja yang terjalin menjadi kian erat, hingga pada akhirnya terbentur pada rasa sungkan dan tidak enak untuk memberhentikan. Celakanya, ketika melakukan rekrutmen awal, perusahaan sama sekali tidak mempertimbangkan unsur intelektualitas, jadilah saat ini CV. X memiliki sejumlah tenaga yang beragam tingkat pendidikanya.

Berikut merupakan diagram tingkat pendidikan karyawan CV. X:

Tabel 4.1
Persebaran Tingkat Pendidikan Karyawan CV. X



Dari bagan diatas terlihat, bahwa mayoritas karyawan yang bekerja pada CV. X belum memiliki jenjang pendidikan yang mumpuni. 18% karyawan yang memegang gelar S1 masing-masing merupakan kepala divisi dan akuntan perusahaan. Sementara sisanya berpendidikan paling tinggi SMA. Sementara 57% karyawan yang berjenjang pendidikan SMP dan SD merupakan kuli dan pekerja lapangan pada CV. X. Rentang pendidikan yang luas ini mempengaruhi gaya kepemimpinan pada perusahaan. Pimpinan seringkali kesulitan menerjemahkan visionarinya kepada para karyawan, sehingga kepemimpinan pada CV. X terkesan satu arah dan kurang demokratis. Arahan-arahan yang diberikan umumnya bersifat spesifik, akibatnya hal tersebut justru mematikan sisi kreatif dan inisiatif dari karyawan. Karyawan terbiasa menerima perintah. Selain itu pola rotasi karyawan dan jenjang karir akan sangat mustahil diterapkan pada CV. X. Akibatnya mungkin karyawan mungkin akan

merasa kurang termotivasi, jenuh dan bahkan akan menemukan celah-celah kelemahan perusahaan untuk dimanfaatkan.

Dampak rentang pendidikan tersebut terhadap praktik akuntansi pada CV. X adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya praktik akuntansi yang baik terhadap operasional perusahaan. Sehingga yang terjadi di lapangan, manajemen cenderung mengabaikan implementasi akuntansi pada perusahaan, bahkan tidak mampu memanfaatkan laporan yang dihasilkan secara maksimal.

Kualitas Informasi Vs Informasi berkualitas

Dari segi linguistik, kualitas berasal dari bahasa latin *quails* yang berarti sebagaimana kenyataannya. Beberapa pakar mendefinisikan kualitas secara beragam. Juran (1989;16-17) mendefinisikan kualitas secara sederhana sebagai kesesuaian untuk digunakan. Sementara Herizer & Renden (1997;92) mengambil sudut pandang berbeda dengan mempersepsikan kualitas sebagai totalitas bentuk untuk memuaskan kebutuhan yang nyata atau tersembunyi. Keseluruhan definisi tersebut terangum secara sederhana dalam pengertian yang dinyatakan Dale (2003;4), menurutnya kualitas adalah karakteristik yang melekat.

Berdasar pemaparan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa kualitas informasi merupakan sejumlah nilai dan kesesuaian mengenai format informasi yang baik. Terkait dengan kualitas informasi yang dihasilkan, FASB telah merumuskan kualitas spesifik dari laporan keuangan dalam dua kategori yaitu, primer (*primary*) beserta unsur-unsurnya dan sekunder (*secondary/interactive*).

Jika dinilai berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh FASB. Maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan masih belum mampu memenuhi kualitas primer maupun sekunder yang diharapkan. Dalam segi relevansi, perusahaan masih belum mampu memenuhi unsur ketepatanwaktu, hal ini tergambar dari aktivitas pelaporan keuangan periode Bulan Mei yang baru diselesaikan pada Bulan Agustus, sehingga laporan keuangan kehilangan unsur prediktif karena tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi yang akan datang. Demikian pula dalam sisi keterandalan, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan masih diragukan dalam hal keterujian, hal ini disebabkan mekanisme dalam penyusunan yang cenderung lebih fleksibel dan praktis, sehingga kerap kali menjadikan standar sebagai nomor dua. Hal serupa juga terjadi dalam proses penyimbolan, sering dijumpai sejumlah akun yang tidak lazim, contohnya terdapat biaya *entertainment* dan sejumlah penyimbolan lain yang kurang representatif.

Lain halnya dalam hal kualitas sekunder. Laporan keuangan perusahaan bisa dinilai cukup baik dalam hal ini. Laporan keuangan perusahaan cukup representatif dalam hal keterbandingan maupun konsistensi dalam penerapan kebijakan terkait pelaporan keuangan. Namun demikian, penulis masih meragukan unsur kenetralan atau netralitas dalam proses penyusunan laporan keuangan, hal ini dikarenakan sejumlah sistem pengendalian serta sistem informasi yang dimiliki perusahaan belum cukup baik untuk menghasilkan satu informasi yang dapat diyakini kebenarannya.

Berdasar uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik akuntansi yang di implementasikan oleh CV. X berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi yang dihasilkan perusahaan. Namun apakah praktik akuntansi pada CV. X mencegah perusahaan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas?. Mengacu pada pendapat bahwa informasi yang berkualitas adalah informasi yang dibutuhkan, maka praktik akuntansi CV. X sama sekali tidak mempengaruhi hal tersebut. Karena praktik akuntansi pada CV. X tidak menghasilkan apapun yang berpengaruh signifikan dan dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan dan pengambilan keputusan. Sementara ditinjau dari pemanfaatannya, maka laporan keuangan CV. X dapat dikategorikan sebagai informasi yang berkualitas, karena mampu memenuhi tujuan dari penyusunannya. Dimana tujuan penyusunan tersebut adalah sebagai prasyarat pengajuan kredit dan pembayaran fiskal. Berbeda dengan kualitas informasi yang didefinisikan sebagai seperangkat kriteria atas informasi yang baik. Informasi yang berkualitas mengambil dimensi kebermafaatan sebagai landasan. Scott (2009) menyatakan informasi yang berkualitas merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Terdapat perbedaan yang nyata antara informasi yang berkualitas dengan kualitas informasi. Dimana kualitas informasi terbentur pada seperangkat nilai, sebaliknya informasi yang berkualitas merupakan cerminan kebutuhan para pemangku kepentingan. Lebih lanjut Scott (2009;59) menyatakan bahwa kualitas informasi merupakan satu kondisi ideal. Kondisi yang merupakan acuan, titik utopis dalam pelaporan keuangan. sementara informasi yang berkualitas merupakan tujuan akhir atas satu mekanisme akuntansi yang baik. Keduanya berada pada dimensi yang berseberangan.

Visibilitas SAK ETAP

Diluar segala penerapan praktik akuntansi ala UMKM maupun SAK ETAP. Peneliti mulai melakukan kajian sederhana mengenai tingkat kebermafaatan SAK ETAP, siapa yang sebenarnya memiliki pretensi dan kepentingan terhadap terselenggaranya pelaporan yang terstandarisasi tersebut.

Berdasar pemahaman peneliti yang masih sangat rendah, peneliti beranggapan hal tersebut merupakan amanat dari entitas perbankan dan perusahaan besar seperti yang disampaikan dalam Buku kajian penetapan *credit rating* yang disusun Bank Indonesia (BI) pada tahun 2009. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai amanat untuk menyalurkan KUR dan kekhawatiran bank terhadap kemungkinan gagal bayar oleh UMKM. Melalui penerapan SAK ETAP, bank dapat menentukan plafon aman tingkat pemberian KUR, sehingga meminimalis kemungkinan gagal bayar. Lebih lanjut bila semua UMKM menerapkan SAK ETAP, maka bank akan lebih mudah menyalurkan pinjamannya kepada UMKM. Artinya semakin besar nilai aset dan perputaran uang pada bank dimana hal tersebut bernilai rupiah yang sangat tinggi.

Ditinjau dari kacamata perusahaan besar, UMKM merupakan potensi yang baik untuk melebarkan sayap. Selain peraturan yang mengatur UMKM sangat minim, jumlah pajak yang harus ditanggung pun relatif kecil. Artinya jumlah laba yang dapat tersimpan lebih besar. Untuk itu tidak heran jika sejumlah perusahaan besar berkeinginan untuk menguasai UMKM tersebut. Melalui jalan standarisasi, proses pengambil alihan atau *merger* akan semakin mudah dilakukan.

Selain itu, dari sisi pemerintah UMKM merupakan sumber wajib pajak yang menggiurkan. Dalam praktiknya seringkali ditemukan UMKM yang kurang bayar, hal ini terjadi karena belum terstrukturnya sistem pelaporan. Sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah laba secara akuntansi yang dimiliki perusahaan. Melalui penerapan SAK ETAP maka nilai laba yang dihasilkan perusahaan akan tergambar jelas, sehingga akan lebih mudah bagi pemerintah untuk memungut pajak atasnya.

Demikian pandangan peneliti mengenai kebermanfaatan SAK ETAP bagi UMKM berdasar studi kasus pada CV. X. Dari berbagai pemaparan di atas peneliti mencapai satu konsep bahwa nilai kebermanfaatan SAK ETAP bagi UMKM masih sangat rendah. Diperlukan lebih dari sekedar standar keuangan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia.

Kesimpulan

Penyelenggaraan praktik akuntansi pada CV. X belum sepenuhnya mengacu kepada SAK ETAP. Meskipun telah mampu menyusun laporan keuangan sebagai bentuk produk akuntansi, namun perusahaan masih gagal dalam optimalisasi informasi akuntansi yang dihasilkan. Selain itu CV. X dinilai terlalu permisif dan fleksibel terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Sehingga tingkat kehandalan laporan keuangan yang dihasilkan masih sangat rendah. Terdapat beberapa alasan yang mendasari penyelenggaraan praktik akuntansi ala CV. X. Secara garis besar hal ini disebabkan rendahnya pemahaman yang dimiliki manajemen mengenai fungsi dan manfaat penggunaan informasi akuntansi, terbatasnya kompetensi dan jumlah personil CV. X serta rendahnya tingkat pengendalian pada perusahaan. Lebih lanjut, kurangnya regulasi terkait implementasi praktik akuntansi menjadi alasan yang tidak dapat dikesampingkan. Penyelenggaraan praktik akuntansi secara signifikan mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan oleh perusahaan, namun demikian hal ini tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan penelitian terdapat sejumlah keterbatasan yakni Penelitian ini berdasar pada satu subjek penelitian saja, sehingga hasilnya hanya mewakili subjek tersebut. Selain itu penelitian dan observasi di lapangan hanya dilakukan dalam tempo waktu 1 bulan, sehingga gambaran mengenai penyelenggaraan praktik akuntansi pada CV. X masih sangat minim. Terakhir penelitian hanya bersifat deskriptif, sehingga hanya bersifat pemaparan tanpa bertujuan untuk memberikan solusi. Untuk itu kedepannya diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas lingkup penelitian dengan memperbanyak subjek penelitian, selain itu penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperpanjang waktu observasi untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik akuntansi UMKM serta menggunakan metode penelitian yang lebih komprehensif sehingga mampu menjadi bahan referensi yang lebih lengkap dan solutif atas penyelenggaraan praktik akuntansi pada UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R. & Schindler, Pamela S. 2006. *Metode Riset Bisnis. Volume 1. Edisi 9*. Terjemahan. PT. Media Global Edukasi. Jakarta.
- Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. 2010. *Metadata Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Metadata/SEKDA/>. Akses tanggal 16 April 2012.
- Furqan, Andi C & Karim. 2011. Problematika Praktik Akuntansi. *Tesis Universitas Tandukalo*.
- Hariyanto, E. 1999. Analisis Kebutuhan Informasi Akuntansi bagi Usaha Perdagangan Eceran (Retail) di Kotatip Purwokerto. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. No. 1/Vol. 1/September.
- HM, Jogiyanto. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.
- Idrus. 2000. *Akuntansi dan Pengusaha Kecil*. Akuntansi. Edisi 07/Maret/Th. VII.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Irianto, Gugus, Unti Ludigo & Iwan Triyuwono (2006). *Semiotika Laba Akuntansi. Makalah Simposium Nasional Akuntansi VII (Denpasar)*
- Kementerian Negara Koperasi & UKM RI. 2013. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011-2012*. http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=257:data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usaha-besar-ub-tahun-2006-2010&Itemid=93 . Akses tanggal 16 Agustus 2013.
- Liker, Jeffrey K. 2004. *The Toyota Way*. Erlangga. Jakarta
- Marbun, B.N. 1997. *Manajemen Perusahaan Kecil*. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Meutia. 2010. Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Menengah Melalui Kompetensi Kewirausahaan dan Modal Sosial, (Sebuah Kajian Teoritis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Tirtayasa Ekonomi*. Vol. 5 (2). Hal. 167-174.
- Misra, Fauzan. 2008. *Investigasi Dan Analisis Empiris Praktik Akuntansi Keuangan*

Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah). *Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*. Jogjakarta. Tidak Dipublikasikan.

Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. Bhayangkara. Jakarta

Pinasti, Margani. 2001. Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha Para Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi* No. 1/Vol. 3/Mei.

Presiden Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Rakyat Merdeka *Online*. (2011). Syarif Hasan: Jumlah Koperasi dan UMKM Terus Meningkat.
<http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/22/49791/Syarif-Hasan:-Jumlah-Koperasi-dan-UMKM-Terus-Meningkat-> Akses tanggal 16 April 2012.

Romney, Marshal B. & Steinbart, Paul John. 2005. *Accounting Information Systems*. Edisi kesembilan. Terjemahan. Salemba Empat, Jakarta.

Rudiantoro, Rizki & Siregar, Sylvia Veronica. 2011. Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh

Sindonews.com (2012). *Kredit UMKM naik 18%*. <http://www.sindonews.com/read/2012/03/28/450/600970/kredit-umkm-naik-18> . Akses tanggal 16 September 2013.

Siegel, Gary & Marconi. 1989. *Behaviour Accounting*. Edisi Terjemahan. South-western Publishing Co. Chicago. IL Carrollton.

Suhairi, Sofri Yahya & Hasnah Haron. 2004. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Kepribadian Wirausaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Investasi. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar.

Wahdini dan Suhairi. 2006. Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.

Weygndant, Jerry J, Paul D. Kimmel & Donald D. Kieso. 2010. *Financial Accounting: IFRS edition*. Willey & Sons. United State of America.

